

**DISKRIMINASI ETNIS ROHINGYA OLEH PEMERINTAH MYANMAR
DI TENGAH TEKANAN INTERNASIONAL**

Rizki Nanda Apriani

20120510336

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Email: rizki.nanda.2012@fisipol.umy.ac.id

Abstract

Ethnic Rohingya be one that is not claimed its existence and discriminated against by the government of Myanmar. Religion identities between Muslim minority and Budhist majority have been made use to raise violence among parties. This paper try to analyze whether the reason the government is still discriminate Rohingya even though the international pressures are high, one of them is the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees). Through literature review, the study results indicate that the reason behind this discrimination in order to pursue their real interests of the domination of power and land ownership and business opportunities (oil and gas). In addition, this study also identifies discriminative policies support by radical Buddhist group.

Keywords: *Discrimination, ethnic Rohingya*

Pendahuluan

Rohingya, merupakan konflik etnis dan agama yang berujung pada tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, yang berujung pada pengusiran etnis Rohingya yang mendiami wilayah Rakhine, Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dikarenakan perbedaan etnis yang tinggal di Myanmar.

Sebagai salah satu minoritas di Myanmar, masyarakat Buddha menempati peringkat sebagai agama mayoritas, diikuti dengan muslim, kemudian Chin (Buddha, Kristen, Animis) dan angka paling kecil di duduki oleh Kaman (juga Muslim, Mru, Khami, Dainet, Maramagyi). Myanmar merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, dan agama dan juga sumber daya alam minyak yang melimpah. Etnis yang paling dominan di Myanmar adalah Bamar, Shan, Kayni, Rakhine, Chinese, Mon, dan Kachin dan Budha sebagai agama yang paling mendominasi di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tinggal di Myanmar yang beragama Islam, akan tetapi mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar serta mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

Masyarakat Rohingya di Myanmar sebenarnya tidak bisa disebut 'Etnis' sepenuhnya karena tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah terkait. Berawal hanya sebagai label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Menurut sejarah, Rohingya disebut sebagai kaum minoritas Muslim yang tinggal di Arakan, namun tidak berjalan dengan harmonis dan menimbulkan konflik.

Pemerintah Myanmar pun menolak mengakui keberadaan etnis Rohingya di Myanmar. Mereka mengatakan bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar. Pemerintah juga mengklasifikasikan etnis Rohingya sebagai imigran ilegal, meskipun telah lama tinggal di Myanmar (Agil Iqbal Cahaya, 2015). Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga

pemuda etnis Rohingya yang membuat Para Biksi dan masyarakat etnis Rakhine membunuh etnis Rohingya, merusak tempat ibadah, mengakibatkan 140ribu terusir dan 800 orang tidak mempunyai kewarganegaraan, 3000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand dan Indonesia (2015).

Konflik antara Rohingya dan Rakhine sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Tetapi kerusuhan yang terjadi Juni 2012 lalu, kembali menyita perhatian dunia internasional. Etnis Rohingnya yang sudah bermukim di Myanmar sejak ratusan tahun lalu, terusmendapatkan perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah Myanmar. Presiden Thein Sein pun tidak ingin mengakui kewarganegaraan dari etnis tersebut dan lebih memilih untuk mendeportasi mereka serta mengumpulkannya dalam tempat penampungan. (Nugraha, Analisi politik konflik Rohingya, 2015)

Ketegangan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine yang mayoritas Budha semakin diperparah dengan adanya isu pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang pemuda Rohingya. Kabar simpang siur yang diberitakan oleh media dengan mudah menyulut konflik dan menyebabkan balas dendam antar etnis ini.

Pasukan militer, polisi menerapkan kebijakan mentarget Etnis Rohingya dengan bukti tidak bergerak untuk menghentikan pertikaian yang terjadi antar Etnis Rohingya dan Budha Rakhine. Hal itu terlihat dari statemen presiden Myanmar Jenderal Thein Sien kepada Komisioner Tertinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) paska kerusuhan dan pertikaian Juni 2012 lalu bahwa satu-satunya solusi penyelesaian konflik di Arakan adalah mengusir seluruh etnis Rohingya ke luar Rakhine/Arakan. Dan setelah itu banyak warga etnis Rohingya yang berusaha melarikan diri dengan menumpang perahu tradisional sepanjang 14 meter. Mereka berjejalan di atas perahu kayu dengan bekal seadanya. Akibat mesin perahu yang mereka tumpangi rusak, etnis Rohingya pun harus rela terkatung-katung di lautan yang ganas. Dan muncullah istilah Manusia Perahu tersebut.

Dan negara-negara yang menjadi tujuan suaka bagi para warga etnis Rohingya antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh. Negara-negara ini melakukan desakan melalui banyak forum internasional kepada pemerintah Myanmar untuk menangani dan memikirkan solusi atas masalah ini. Namun dilain sisi hanya dapat sedikit campur tangan, contohnya adalah Bangladesh, yang banyak menerima pengungsi asal Arakan. Namun, dikarenakan ketutupan Negara Myanmar terhadap dunia internasional, dan penanggulangan yang cenderung pasif, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Negara luar untuk membantu masalah ini. Walaupun organisasi PBB dan negara-negara lain telah meminta pemerintah Myanmar untuk merubah sikap mereka terhadap warganya, mereka cenderung tidak mau merubah sikapnya yang diktator. Dan sampai saat ini keberadaan warga minoritas etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai salah satu etnis asli Myanmar. Dan terkesan tidak di inginkan di negara mereka sendiri.

Setelah Myanmar merdeka dan U Nu berkuasa, kemudian berdiri organisasi BMC. The Burma Muslim Congress (BMC) adalah organisasi yang berdiri untuk memperluas nasionalisme Myanmar tetapi tidak didirikan sebagai organisasi agama. U Nu membuat keputusan “anti Muslim”, agar organisasi The Burma Muslim Congress (BMC) meninggalkan AFPFL (organisasi anti rasis) pada April 1948. Hal tersebut karena BMC dianggap sebagai organisasi agama dan aktifitasnya tidak sama dengan tujuan politik AFPFL. Tujuan awal BMC adalah untuk memperkuat nasionalisme Myanmar dilingkungan orang-orang muslim, termasuk khususnya kaum imigran. Realitas sosialitas saat itu memperlihatkan bahwa di lingkungan imigran muslim ada yang berorientasi mendukung nasionalisme Pakistan berpisah dari India, hal tersebut menjadikan BMC bukan lagi sebagai organisasi keagamaan. Sebagian pemimpin BMC menentang dan membangun organisasi baru yaitu Burma Muslim League (BML).

Masalah yang muncul adalah tentang legalitas atas status kependudukan Rohingya di Myanmar. Hukum kewarganegaraan yang berlaku di Myanmar semakin ketat dan kompleks. Pada tahun 1982, Myanmar mengeluarkan undang-

undang tentang kewarganegaraan yang intinya menciptakan tiga kelas warga, yaitu warga negara penuh (diberi hak penuh warga negara Myanmar), warga negara asosiasi (warga negara gabungan dari warga lain), dan warga negara naturalisasi (warga asli). Warga Rohingya tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori kewarganegaraan tersebut.

Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 secara langsung mengatur tentang kendali Pemerintah junta militer Myanmar dalam memberikan status kewarganegaraan ataupun menghapus status kewarganegaraan warga negaranya dan ini didukung dengan partai politik dan para biksu garis keras yang ingin etnis Rohingya diusir dari Myanmar.

Pemerintah Myanmar menolak desakan internasional, maupun tekanan dari internasional, agar ikut memikirkan solusi atas pelarian ribuan warga etnis Rohingya dan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah junta militer. Tekanan yang berasal dari dalam dan luar negeri pun didapatkan dari organisasi-organisasi di dunia tidak di tanggapi oleh pemerintah Myanmar sendiri.

Negara mayoritas Buddha itu malah menyatakan tidak akan pernah mengakui dan adanya kepentingan dan alasan apa dibalik kebijakan diskriminatif yang tetap dijalankan oleh pemerintah Myanmar walaupun ada tekanan yang berasal dari internasional.

Kerangka Dasar Teori

1. Teori Sistem Politik

Teori sistem adalah serangkaian variabel yang saling berkaitan, dan saling mempengaruhi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, begitu pula sistem politik yang ada di suatu negara.

Pengertian dari teori sistem itu sendiri adalah:

as a series of statement about relationship among independent and dependent variable wich change in one or more variable are

accompanied, or combination of variable followed by change in other variable of combination variable. (Dougherty & L.P, Jr)

Studi politik berusaha memahami bagaimana sebuah keputusan atau kebijakan yang sah dibuat serta dilaksanakan oleh suatu negara. Dengan menggunakan teori ini, kita juga dapat memahami fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu negara tersebut, seperti partai politik, kelompok kepentingan, lembaga pemerintah, serta memahami praktek-praktek politik yang terjadi, guna memperoleh gambaran kasar apa yang terjadi dalam setiap unit politik.

Adanya berbagai macam input dalam hal ini ada tuntutan dan dukungan, dianggap sebagai satu hal yang dapat terus menjamin keberlangsungan suatu sistem. Input-input tersebut kemudian diproses di dalam sistem politik menjadi output. Berbagai macam output ini lah yang nantinya menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri, maupun lingkungan dimana sistem itu berada.

Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang research). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (library mempelajari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

Pembahasan

A. Adanya Desakan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

OKI mengatakan bahwa dengan adanya komunikasi dan kerjasama pihak berwenang di Myanmar, negara-negara anggota OKI dapat ikut membangun mekanisme pemberian bantuan ekonomi dan kemanusiaan untuk semua orang

yang membutuhkan, membangun kepercayaan antara masyarakat, dialog antar agama serta keahlian teknis untuk membantu Myanmar dalam transisi demokrasi dan integrasi ke dalam masyarakat internasional di Myanmar.(Desakan OKI, 2015)

OKI juga secara gamblang ambil andil dalam kasus etnis Rohingya mereka mengambil langkah dalam membantu penyelesaian konflik rohingya adalah melakukan KTT negara-negara anggota OKI dalam rangka membahas langkah apa yang akan diambil untuk membantu penyelesaian masalah ini. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa OKI ke 4 memberikan penegasan bahwa OKI akan bekerja sama dengan ASEAN dalam penyelesaian konflik rohingya, dimana ASEAN sendiri sedang memberikan bantuan Myanmar dalam rangka melakukan reformasi dan demokrasi. Dengan adanya demokrasi di Myanmar diharapkan akan ada penghormatan atas hak-hak penduduk dan berbagai komunitas yang ada di Myanmar termasuk Rohingya.

Upaya diplomatik juga dilaksanakan OKI dengan membujuk Myanmar agar mengizinkan negara-negara islam dan organisasi kemanusiaan memberikan bantuan kepada muslim rohingya. Pada 10 agustus 2012 delegasi OKI melakukan pertemuan dengan presiden Myanmar Thein Sein yang membahas situasi kemanusiaan didalam negara bagian Rakhine dan Myanmar setuju dengan usulan OKI. OKI juga menekankan kesemua negara-negara terutama negara islam serta organisasi internasional lainnya untuk melakukan upaya diplomatic terhadap Myanmar dalam menyelesaikan masalah rohingya karena diketahui sendiri bahwa Myanmar merupakan negara yang cukup tertutup, sehingga upaya-upaya selain diplomasi ditakutkan akan membuat kondisi semakin memburuk. OKI tidak hanya menyerukan negara lain ataupun organisasi internasional lain untuk ikut membantu, OKI sendiri telah memberikan bantuan langsung kepada pengungsi Rohinya pada tahun 2012 ini. OKI telah berupa memperlihatkan bahwa OKI tidak hanya fokus pada masalah-masalah timur tengah terutama Palestina dan Zionis namun juga fokus pada setiap masalah yang dihadapi oleh umat islam diseluruh dunia. OKI sebagai organisasi islam terbesar didunia sudah mampu

memperlihatkan bahwa pendapat-pendapat salah mengenai OKI tidaklah benar. Kedepannya OKI diharapkan lebih agresif dan peka melihat berbagai isu dan masalah yang menyangkut umat Islam. (Perwujudan Komitmen OKI Melalui Konflik Rohingya, 2016)

B. Desakan yang berasal dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

Ada akibat yang dihadapi oleh Myanmar terkait dengan pengungsi etnis Rohingya yang diusir oleh negaranya sendiri. Banyak pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar karena merasa terancam dengan perlakuan buruk karena sukunya, agamanya dianggap berbeda dengan mayoritas yang terdapat di negara tersebut. Dan para pengungsi berhak mendapatkan memperoleh haknya dan UNHCR berupaya agar mereka memperolehnya.

Badan Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mengecam Pemerintah Myanmar karena memberlakukan pembatasan pada “kebebasan dasar” masyarakat Rohingya yang teraniaya.

Di samping itu UNHCR juga mendesak Pemerintah Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada warga Rohingya, minoritas Muslim di negara itu

C. Dukungan Kelompok Buddha Garis Keras

Pada kelompok Buddha, dukungan juga datang dari para politisi dari *Rakhine Nationalities Development Party* (RNDP) yang berperan sebagai aktor yang menyekuritisasi isu agama dan etnis kepada warga Buddha Rakhine. Dan para biksu beraliran keras yang juga menjadi aktor yang mensekuritisasi gerakan anti-Muslim Rohingya dan menyuarakan pengusiran warga Muslim dari pemukiman yang didominasi orang Buddha. Salah satu pimpinannya adalah Biksu Wirathu yang dijuluki oleh media internasional sebagai “Burmese bin Laden”.

D. Kepentingan Sumber Daya Alam Minyak

Seperti negara lain suatu negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri seperti dijelaskan oleh Morgenthau yaitu "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik" (Morgenthau, 1951).

Dan dalam hal ini sangat terlihat bahwa Myanmar punya kepentingan dibidang ekonomi yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkat kan perekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp, 1988).

Kepentingan ekonomi ini juga sangat erat kaitannya dengan geopolitik dari suatu negara yang mendasarinya. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa power membutuhkan "tempat". Semakin sebuah negara ingin memperkuat power-nya, maka yang dibutuhkan adalah "tempat" yang semakin besar pula. Sehingga bisa dipahami jika perbatasan adalah refleksi dari kekuasaan negara, seperti yang ditegaskan dalam kutipan ini: "the raising power will make territorial demands, and, conversely, that a declining power will be challenge by territorial claims" (Perwita & Bantarto, 2013)

Walaupun secara faktual yang kita tahu adalah etnis Rohingya sebagai korban namun banyak yang berpendapat ada agenda terselubung yang bersandarkan pada ekonomi yang melibatkan pertarungan bagi para korporasi-korporasi di dunia yang melibatkan pemerintahan junta militer. Pendapat ini didasarkan pada kemunculan sistem baru di Myanmar, selain menggunakan rezim otoriter militer, Myanmar juga menggunakan sistem pasar dalam pemerintahannya (Wawancara khusus Agenda Tersembunyi Tragedi Rohingya

Myanmar, 2016). Dengan munculnya undang-undang baru yang bernama The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing di dalamnya. Pada kasus Arakan ini adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi.

Kerjasama antara China dan Myanmar yang berhasil dijalin melalui pembangunan mega proyek pipa minyak dan gas Shwe (trans-China-Myanmar). Pada tahun 2004 China National Petroleum Corporations (CNPC) berhasil melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan minyak Myanmar, yaitu Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Kedua perusahaan gas ini sepakat menandatangani MoU pembangunan jaringan pipa yang menyalurkan sumber daya minyak dan gas di wilayah Arakan, Myanmar.

Struktur jaringan pipa gas tersebut dibangun melalui wilayah Kyaukphyu Port di wilayah Rakhine menuju ke Provinsi Yunan di Cina. Pipa sepanjang 620 mil tersebut mengandung nilai investasi sebesar USD 2,5 miliar (Dalle, 2013). Kerjasama di antara kedua perusahaan ini berupa kontrak alur pembelian minyak dan gas lintas negara yang ditujukan untuk memenuhi suplai permintaan sumber daya minyak dan gas alam dari Cina. Kontrak kerjasama ini sekiranya akan berjalan selama 30 tahun, yang mana CNPC menjadi pengelola dominan didasarkan pada kepemilikan saham investasi sebesar 50,9%, sedangkan sisanya dimiliki oleh MOGE (Kajian Metodologi, 2016).

Kesimpulan

Pemerintah Myanmar menolak mengakui etnis Rohingya dan mengklasifikasikannya sebagai imigran ilegal. Karena inilah banyak etnis Rohingya yang melarikan diri dan berexodus ke negara-negara disekitar Myanmar seperti Indonesia, Thailand, dan Bangladesh. Negara-negara ini juga melakukan desakan-desakan terhadap pemerintah Myanmar untuk mengatasi masalah ini.

Budha sebagai agama mayoritas di Myanmar menjadikan faktor penting dalam. Etnis Rohingya mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Etnis

Rohingya tinggal di wilayah Arakan yang juga dihuni oleh etnis Rakhine, tetapi hubungan antara keduanya tidak harmonis. Pada Mei 2012, konflik terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine bernama Ma Thaida Htwe yang terjadi pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya. Para Biksi dan masyarakat etnis Rakhine berdemonstrasi “No Rohingya”, membunuh etnis Rohingya, merusak bangunan ibadah, dan merusak tempat tinggal.

Tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sangat merugikan ini sangat berkaitan dengan adanya dukungan dan tuntutan yang berasal dari internasional. Tuntutan tersebut datang dari OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mendesak agar tidak mendiskriminasikan etnis Rohingya berdasarkan tujuan yang sudah dimiliki oleh OKI yaitu untuk menciptakan perdamaian agar etnis muslim Rohingya dapat merasakan manfaatnya, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) yang mendesak untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya agar mereka tidak lari dari negara mereka sendiri.

Diskriminasi ini tetap berlangsung dikarenakan adanya dukungan dari Buddha Garis Keras (Ma Bha Tha) dan juga adanya kepentingan ekonomi antara Myanmar dan negara korporasinya yaitu China.

Namun dukungan kelompok Buddha garis keras ini menyebabkan etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha juga mengalami situasi politik yang tidak menyenangkan, terjadinya diskriminasi oleh pemerintah mereka sendiri, marginalisasi ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan bahasa dan juga kultur. Keluhan ini sangat dirasakan oleh etnis Rakhine dikarenakan rasa nasionalisme dan sejarah kemerdekaan yang panjang.

Dibalik tindakan diskriminasi tersebut terselip sebuah kepentingan ekonomi. Dan dalam hal ini sangat terlihat bahwa Myanmar punya kepentingan dibidang ekonomi yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil

oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Kepentingan ekonomi ini juga sangat erat kaitannya dengan geopolitik dari suatu negara yang mendasarinya. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa power membutuhkan “tempat”. Semakin sebuah negara ingin memperkuat power-nya, maka yang dibutuhkan adalah “tempat” yang semakin besar pula. Sehingga bisa dipahami jika wilayah ini dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah Myanmar.

Dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tidak terlepas dari adanya dukungan dan juga kepentingan dari pemerintah itu sendiri. Terlepas dari desakan yang sama sekali tidak digubris oleh pemerintah Myanmar ini jelas menjadi alasan mengapa pemerintah Myanmar tetap mendiskriminasikan etnis Rohingya.

Daftar Pustaka

Buku

Dougherty, J. E., & L.P, Jr, R. (t.thn.). Military Industrial Complex Amerika Serikat. Dalam H. Dahlan. (Laporan Hasil Penelitian) FISIPOL UMY.

DR. H. Saifullah, S. M. (2010). Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perwita, A. B., & Bantarto, B. (2013). Pengantar Kajian Strategis. Dalam d. Anak Agung Banyu Perwita. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Papp, D. (1988). "Contemporary Internasional Relations": A Framework for Understanding, Second Edition. New York: MacMillan Publishing Company.

Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.

Mas'ood, M., & Mac Andrews, C. (1996). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajahmada University Pers.

May, R., & Anwar, D. F. (2005). *Konflik Kekerasaan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal dan Laporan

Than, T. M. (September 2000). *Myanmar: The Dillema of Stalled Reforms*. Singapore: Intitute of Southeast Asian Studies 30 Heng Mui Keng Terrace`

Revolusi, A. (2016, Februari 21). Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar tahun 2012. Diambil kembali dari Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember 2013: <http://repository.unej.ac.id>

hrw.org. (2016, Maret 08). Diambil kembali dari http://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm#P145_42031

Group, I. C. (2013). *A Tentative Peace in Myanmar's Kachin Conflict*. Yangon, Jakarta, Brussel.

Website

Agil Iqbal Cahaya, S. (2015, Juni 16). "Rohingya Korban Minoritas yang Terusir Dari Negaranya". Diambil kembali dari www.setkab.go.id/artikel-5309-html

Alam, M. A. (2006, Maret 07). *A short Historical Background*. Diambil kembali dari <http://www.rohingyatimes.i.p.com/history/history.maa.html>.

Ardiansyah, F. (2016, Januari 08). Sekilas Sejarah Tentang Imigran Rohingya.

Diambil kembali dari

<http://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154625/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya/>

Joko, T. (Februari 2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No.2, 840

Kurnia. (2015, May 30). *Mi'raj Islamic News Agency*. Diambil kembali dari <http://www.mirajnews.com/id/unhcr-desak-myanmar-berikan-kewarganegaraan-kepada-muslim-rohingya/75286>

Nugraha, F. (2015, Juni 16). Analisis politik konflik Rohingya. Diambil kembali dari <http://politik.kompasiana.com/2012/08/009/analisis-politik-konflik-rohingya-483820/>

Purnomo, A. (2010). Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Myanmar etnis Rohingya di Bangladesh. 27.